

IMPLEMENTASI *STRENGTHS-PERSPECTIVE* DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Marcelino Vincentius Poluakan¹

¹Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

¹marcelinopoluakan86@gmail.com

Nandang Mulyana²

²Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran

²mulyananandang@yahoo.com

Hadiyanto A. Rachim³

³Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Padjadjaran

³hrachim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif seharusnya membuat setiap sarannya menjadi mandiri, berdaya, *sustainable*, terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi permasalahan kemiskinan atau untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk mencapai nilai-nilai di atas, program pemberdayaan masyarakat miskin perlu memuat *strengths-perspective* di dalamnya. Tulisan ini akan membahas pentingnya *strengths-perspective* sebagai sebuah paradigma baru dalam pekerjaan sosial dalam program pemberdayaan masyarakat miskin untuk mencapai cita-cita yang diharapkan yaitu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Tulisan ini akan menggunakan studi literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil kajian, prinsip *strengths-perspective* sangat diperlukan dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya, dibutuhkan upaya untuk mengimplementasikan *strengths-perspective* terutama dalam analisis kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial yang *strengths-based*.

Kata kunci: perspektif kekuatan, program pemberdayaan, analisis kebijakan dan program

THE IMPLEMENTATION OF STRENGTHS-PERSPECTIVE IN EMPOWERMENT PROGRAM FOR THE POOR COMMUNITY

Marcelino Vincentius Poluakan¹

¹Postgraduate Program of Social Welfare Studies, FISIP, Padjadjaran University

¹marcelinopoluakan86@gmail.com

Nandang Mulyana²

²Departement of Social Welfare Studies, FISIP, Padjadjaran University

²mulyananandang@yahoo.com

Hadiyanto A. Rachim³

³Departement of Sociology, FISIP, Padjadjaran University

³hrachim@yahoo.co.id

ABSTRACT

Empowerment is one of the government's strategies to alleviate poverty in Indonesia. An effective empowerment program should make each of its targets become independent, empowered, sustainable, involved or participate in development, and have the resilience in dealing with poverty problems or to get out of poverty. To achieve these values, the empowerment program should contain strengths-perspectives in it. This paper will discuss the importance of strengths-perspective as a new paradigm in social work in the empowerment program to achieve the expected goals of solving the problem of poverty. This paper will use literature studies such as books, articles, and other sources relevant to the topics discussed. This study show that the principle of strengths-perspective is very much needed in an empowerment program. Furthermore, efforts are needed to implement strengths-perspectives especially in empowerment policy or program analysis by using a strengths-based social policy analysis framework.

Keywords: *Strength-Perspective, empowerment program , policy and program analysis*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan dikaji. Hal ini disebabkan oleh masalah kemiskinan yang semakin kompleks serta selalu *update*. Hingga saat ini, banyak kajian dan penelitian yang membahas kemiskinan serta berupaya mencari solusi yang efektif untuk mengatasinya.

Kemiskinan merupakan masalah global sebagaimana disepakati oleh berbagai negara di dunia. Kesepakatan tersebut nampak dalam dokumen SDG's (*Sustainable Development Goals*) dimana kemiskinan menjadi salah satu prioritas perhatian dari negara-negara di dunia (Ishartono, 2016:159-160).

Salah satu kebijakan yang diambil untuk mengatasi kemiskinan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat miskin dapat mengenali serta meningkatkan kekuatan dan potensi yang mereka miliki sehingga dapat melepaskan diri dari situasi kemiskinan. Pemberdayaan juga memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk memiliki kekuatan dalam mengakses sumber-sumber kehidupan serta mengontrol kehidupan mereka sendiri (Fahrudin, 2012:67-68).

Program pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif akan menghasilkan *outcome* yang jelas dan terukur kepada setiap sarannya. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pemberdayaan seharusnya memiliki kekuatan untuk menjadi mandiri, *sustainable*, mampu terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan, memiliki ketahanan atau resiliensi ketika berhadapan dengan situasi kemiskinan, bahkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dari berbagai kajian tentang *outcome* program, ada klaim yang

mengatakan bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin belum menjawab persoalan kemiskinan secara maksimal. Beberapa alasan yang dikemukakan misalnya kurang efektifnya program pemberdayaan yang ada sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar dari sasaran penerimanya (Putera, 2007:38). Persoalan lain adalah kurangnya partisipasi sasaran penerima dalam program pemberdayaan sehingga mereka menjadi objek dan bukan subjek perubahan atau pelaku aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan (Huraerah, 2013:6).

Dari beberapa kajian di atas, program pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia perlu dianalisis terutama dari sisi *strengths-perspective*. Pendekatan *strengths-perspective* merupakan sebuah paradigma dalam pekerjaan sosial yang berfokus pada kekuatan, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh setiap penyandang masalah serta lingkungan sekitarnya sebagai sumber atau pusat pertolongan, dan bukan pada permasalahan atau patologis (Saleebey, 1992 dalam Chapin, 2011:2).

Implikasinya bagi kebijakan sosial ataupun program pemberdayaan masyarakat miskin adalah setiap program seharusnya memuat nilai-nilai yang *strengths-based*. Program yang *strengths-based* dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sarannya serta lingkungannya. Kekuatan dan potensi tersebut kemudian didayagunakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, setiap sarannya dapat menjadi mandiri, berdaya, memiliki ketahanan, memperoleh keberlangsungan hidup (*sustainable*), terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan dan seterusnya.

Upaya menggali atau mengimplementasikan pendekatan *strengths-perspective* dalam kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat miskin dapat menggunakan instrumen dalam

analisis kebijakan sosial. Dalam mengkaji *strengths-perspective* dalam program pemberdayaan, kita dapat menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial yang *strengths-based* yang dikembangkan oleh Chapin (2011). Kerangka tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis kebijakan maupun program pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya (Quade dalam Suharto, 2012:85).

Tulisan ini berupaya memahami konsep *strenght-perspective* sebagai pendekatan bagi kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam program pemberdayaan masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan kajian literatur atau dokumen, yaitu berupa buku-buku, artikel, berita ataupun jenis tulisan lainnya yang terkait pendekatan *strengths-perspective* dalam kebijakan sosial.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Sosial

Kebijakan merupakan program aksi yang diadopsi oleh sebuah organisasi formal. Kebijakan menjadi sebuah keharusan karena adanya peningkatan kompleksitas dan kecepatan dalam organisasi tersebut. Kebijakan biasanya berbentuk tertulis yang memuat pernyataan preskriptif tentang tujuan, pembuatan keputusan dan aktivitas organisasional. Kebijakan memainkan peranan penting terutama dalam sebuah organisasi yang besar dan formal seperti

korporasi, universitas, organisasi keagamaan dan non-profit, rumah sakit dan pemerintahan (Midgley, 2009:3-4).

Pemerintahan sebagai sebuah organisasi besar dan formal mengadopsi kebijakan. Kebijakan menjadi sarana untuk memajukan pengembangan ekonomi, menjaga hukum dan ketertiban, mengatur hubungan dengan negara lain, membela negara dalam menghadapi ancaman-ancaman dari luar, melestarikan lingkungan hidup, menumbuhkan komunikasi, serta mengendalikan pertumbuhan di daerah perkotaan. Pemanfaatan kebijakan sebagai sarana untuk mengatur seperti di atas menjadikannya sebuah kebijakan bersifat publik. Masyarakat umum dapat mengakses kebijakan tersebut serta menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut. Konteks kebijakan publik menjadi lebih sempit ketika pemerintah mengadopsi kebijakan publik tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Di sini kita mengenalkan sebagai kebijakan sosial (Midgley, 2009:4).

Kebijakan sosial berhubungan dengan praktik atau pembelajaran prinsip-prinsip kesejahteraan sosial ataupun sistem kesejahteraan dalam suatu negara atau pemerintahan. Kesejahteraan sosial menjadi tujuan dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya sehingga pemerintah memunculkan dan mengembangkan suatu kebijakan sosial (Walsh, 2000:2).

Dalam konteks penggunaannya, kebijakan sosial dapat merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut Suharto (2012:82), kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*course of action*), kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guideline*), rencana (*plan*), peta (*map*) dan strategi, yang dirancang untuk

menterjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial.

Selain dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial, kebijakan sosial juga dapat merujuk pada suatu bidang akademik yang membahas berbagai tindakan yang diambil negara yang mempengaruhi kesejahteraan rakyatnya (Spicker, 2014:10-16; Walsh, 2000:2; Midgley, 2000:4-9). Sebagai suatu bidang akademik, kebijakan sosial mengkaji berbagai visi dan perspektif tentang bagaimana negara dapat mensejahterakan warganya serta dengan cara apa. Kajian tersebut kemudian bisa menjadi input ataupun masukan bagi pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan sosial umumnya muncul karena adanya permasalahan sosial yang harus diselesaikan. Kebijakan sosial bahkan sering diidentikkan sebagai jawaban terhadap permasalahan sosial. Sesuatu dianggap sebagai sebuah masalah karena perlu diselesaikan, terlepas dari apakah penyandang masalah tersebut dianggap masalah tersebut adalah sebuah gangguan yang harus diselesaikan atau tidak (Spicker, 2014:63). Masalah sosial juga terjadi dalam konteks sosial dan bukan dalam konteks pribadi atau individu. Di sini, masalah sosial terkonstruksi secara sosial serta memerlukan penanganan secara sosial (Spicker, 2014:63).

Program Pemberdayaan

Kebijakan sosial dioperasionalkan dalam bentuk program, misalnya program pemberdayaan. Program pemberdayaan merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan umumnya diartikan sebagai proses menuju berdaya

atau memperoleh kekuatan atau daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyan dalam Putera, 2007:38). Pemberdayaan juga memiliki dua arah yaitu upaya untuk lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan (Kartasasmita, 1996 dalam Tampubolon, 2006:11).

Program pemberdayaan menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat dengan mengembangkan berbagai skema berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan (Rustanto, 2015:116). Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat miskin, perlahan-lahan mereka akan keluar dari garis kemiskinan serta memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Aspek penting dalam sebuah program pemberdayaan adalah perannya dalam memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat sebagai subjek dan pengguna hasil-hasil pembangunan untuk menentukan sendiri program-program dan tujuan pembangunan sesuai masalah, kebutuhan, dan potensi lingkungan setempat. Selain itu, program pemberdayaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku-pelaku usaha yang lebih merata di kalangan masyarakat bawah atau masyarakat akar rumput (Mulyawan, 2016:48-49).

Sebagai sebuah proses, program pemberdayaan juga harus memuat upaya-upaya sebagai berikut (Kartasasmita, 1996 dalam Mulyawan, 2016:62):

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*);

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); dan
3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang.

Strengths-Perspective

Strengths-perspective atau perspektif kekuatan merupakan pendekatan dalam pekerjaan sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Dennis Saleebey (Guo, 2010:235). Saleebey (dalam Chapin, 2011:2) mendefinisikan *strengths-perspective* sebagai sebuah pendekatan filosofis bagi pekerjaan sosial yang menempatkan tujuan, kekuatan dan sumber-sumber dari manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai fokus utama dalam proses pertolongan, dan bukan pada permasalahan atau patologi.

Dalam perkembangan penggunaannya, pendekatan *strengths-based* mulai diterapkan dalam analisis dan pengembangan kebijakan sosial. Chapin (1995:506) mengatakan bahwa *strengths-perspective* dapat digunakan untuk memformulasikan kembali pendekatan yang *problem-focused* dan *pathology-centered* dalam pengembangan kebijakan sosial. Sejak itu, beberapa ahli pekerjaan sosial seperti Rapp, Pettus, Goscha (2006) dan Hill (2008) mencoba menyusun kerangka konseptual sebuah kebijakan sosial yang *strengths-based*. Mereka juga mencoba mengaplikasikan kerangka analisis kebijakan yang *strengths-based* dalam menganalisis kebijakan sosial terkini khususnya di Amerika Serikat. Bagi Chapin, dengan mengaplikasikan gagasan *strengths-perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial, akan muncul pendekatan yang lebih inklusif dalam formulasi kebijakan dan memperluas opsi kebijakan yang memberdayakan.

Analisis Kebijakan dan Program

Untuk mengembangkan sebuah kebijakan sosial diperlukan suatu analisis kebijakan. Secara umum, analisis kebijakan berkaitan dengan penjelasan tentang apa itu kebijakan, bagaimana kebijakan dikembangkan, dan mengapa kebijakan itu penting (Spicker, 2014:223). Sebuah analisis kebijakan membutuhkan langkah-langkah yang dapat membuat isu-isu yang kompleks menjadi terbagi-terbagi sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Sebuah analisis kebijakan sosial merupakan upaya untuk menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan (Dunn, 1991 dalam Suharto, 2012:84). Melalui analisis kebijakan sosial, dihasilkan suatu informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya (Quade, 1995 dalam Suharto, 2012:85).

Untuk melakukan analisis kebijakan, dibutuhkan kerangka analisis yang jelas dan tepat. Dalam konteks ini, posisi dan peran dari analisis kebijakan adalah untuk menggali serta mengimplementasikan pendekatan *strengths-perspective* dalam pengembangan kebijakan sosial khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin. Lewat analisis kebijakan, kita dapat memperoleh informasi apakah sebuah program pemberdayaan telah memuat nilai-nilai yang *strengths-based* sebagaimana dalam kerangka kebijakan sosial yang *strengths-based*.

PEMBAHASAN

Kebijakan Sosial yang *Strengths-Based*

Pendekatan *strengths-based* merupakan suatu kekhasan dalam pekerjaan sosial. Pendekatan ini merupakan upaya untuk mengubah paradigma dari pendekatan *problem-based* yang berfokus pada kekurangan, defisiensi atau patologi dari penyandang masalah sosial. Lewat pendekatan *strengths-based*, kekuatan, tujuan, dan sumber daya individu serta komunitasnya didayagunakan untuk keluar dari permasalahan.

Dalam konteks kebijakan sosial, Rapp, Pettus, dan Goscha (2006:5-14) menggagas enam prinsip kebijakan sosial yang *strengths-based* sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial yang *strengths-based* sejalan dengan pengalaman atau agenda dari sarannya;
 2. Kebijakan sosial yang *strengths-based* menempatkan masalah pada tempatnya;
 3. Kebijakan sosial yang *strengths-based* menekankan persamaan dan persepsi yang positif terhadap lingkungan;
 4. Kebijakan sosial yang *strengths-based* bersifat sukarela bagi sarannya;
 5. Kebijakan sosial yang *strengths-based* menekankan pada pilihan; dan
 6. Kebijakan sosial yang *strengths-based* memberikan insentif kesejahteraan yang terstruktur bagi sarannya.
- Sedangkan menurut Hill (2008:112-113), beberapa komponen kunci kerangka kebijakan yang *strengths-based* antara lain:
1. Formulasi kebijakan bersifat terbuka dan melibatkan siapa saja yang menjadi sarannya;
 2. Mempertimbangkan faktor-faktor normatif-afektif karena pelibatan sasaran kebijakan akan menciptakan hubungan emosional sehingga kebijakan yang disusun dapat membantu sarannya;
 3. Kebijakan dimulai dengan pernyataan tujuan dan permasalahan yang didefinisikan sebagai penghambat untuk mencapai tujuan;
 4. Penyandang masalah tidak dipandang sebagai masalah dan tidak dilihat apa yang salah dari mereka.
 5. Kebijakan yang disusun harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target atau sasaran kebijakan. Tujuannya sebangun dengan pengalaman dari sarannya serta memahami keragaman persepsi dari sarannya tentang masalah yang mereka hadapi dan bukan menciptakan persepsi tunggal untuk diterapkan kepada setiap orang;
 6. Kebijakan harus bersifat sukarela bagi setiap sarannya dan menghormati hak mereka untuk memilih layanan yang mereka inginkan. Kebijakan tidak boleh memaksa namun menciptakan peluang bagi orang untuk menggunakan kekuatan, bakat, dan keterampilan mereka untuk memenuhi tujuan yang diinginkan;
 7. Kebijakan menekankan keanggotaan yang setara dan persepsi yang positif terhadap lingkungan. Sumber daya komunitas yang telah ada dan “alami” harus dimanfaatkan untuk mengatasi masalah mereka.
 8. Kebijakan bersifat jangka panjang dan bukan sebuah respons jangka pendek terhadap permasalahan;
 9. Evaluasi efektivitas kebijakan harus mencerminkan gagasan dari kelompok sasaran kebijakan atau mereka yang paling merasakan dampak dari kebijakan atau jelas dipengaruhi oleh kebijakan tersebut;
 10. Adanya penghargaan untuk setiap prestasi dan keberhasilan; bukan sekedar memberi hukuman terhadap kegagalan.

Kerangka Analisis Kebijakan Sosial yang *Strengths-Based*

Untuk menganalisis sebuah kebijakan, banyak ahli kebijakan telah menggagas kerangka analisis sebagai pedoman seperti Chambers, Dobelstein, Gilbert and Terrell, Popple and Leighninger (Chapin, 2011:158). Dari berbagai kerangka dan sudut pandang para ahli di atas, Chapin mengembangkan kerangka analisis yang cukup mudah bagi kita untuk mulai menganalisis sebuah

kebijakan serta menggali aspek *strengths-perspective* dalam sebuah kebijakan sosial. Kerangka tersebut terdiri dari tujuan dan sasaran dari kebijakan, manfaat dan layanan yang diberikan, aturan kelayakan, sistem penyampaian layanan, dan pembiayaan. Masing-masing kerangka tersebut memiliki indikator tersendiri untuk melihat sejauh mana kerangka tersebut telah memuat *strengths-perspective*.

Matrik 1. Kerangka Analisis *Strengths-Perspective*

Komponen	Indikator
Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dinyatakan secara jelas dan tidak abstrak atau umum - Tujuan memuat rincian yang spesifik tentang layanan dan hasil yang diharapkan - Tujuan dinyatakan secara publik (tujuan manifes) - Tujuan mencerminkan apa yang ingin dicapai/dapat memecahkan masalah dari sasaran program - Tujuan tersedia sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh sasaran program serta masyarakat umum
Manfaat dan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat dan layanan didesain untuk menghilangkan hambatan sosial yang selama ini menyulitkan sasaran program untuk memenuhi kebutuhan mereka - Manfaat dan layanan berfokus pada upaya memperbaiki perilaku sasaran program - Manfaat dan layanan telah memaksimalkan potensi, kekuatan dan sumber daya yang ada dalam diri sasaran program dan komunitasnya - Manfaat dan layanan memberikan <i>outcome</i> yang positif bagi sasaran program
Aturan Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan kelayakan dilengkapi dengan prosedur tertentu yang menghilangkan stigmatisasi atau tidak menyulitkan orang yang layak untuk mengajukan diri sebagai sasaran program - Struktur aturan kelayakan membuka peluang selebar-lebarnya bagi sasaran program untuk mengembangkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mereka
Sistem Penyampaian Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem penyampaian layanan didesain untuk membangun aset yang sudah ada di masyarakat dan tidak membuat suatu struktur terpisah yang baru - Sistem penyampaian layanan membuka berbagai macam pilihan bagi sasaran program - Sistem penyampaian layanan telah melibatkan SDM dari berbagai latar belakang, misalnya etnis, agama, pendidikan, dan sebagainya - Sistem penyampaian layanan dapat diakses oleh sasaran program dari berbagai latar belakang, misalnya etnis, agama, pendidikan, dan sebagainya - Sistem penyampaian layanan telah bersifat <i>cost-effective</i> bagi sasaran program untuk mencapai hasil yang diharapkan
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber pembiayaan menjamin stabilitas/kelangsungan program serta kecukupan/ketersediaan anggaran - Sistem pembayaran/<i>reimbursement</i> telah menjadi kelangsungan pemberi layanan - Sistem pembiayaan mempertimbangkan efektivitas biaya sehingga program ini dapat dilanjutkan atau mungkin dikembangkan sebuah kebijakan baru dan tidak dihentikan

Sumber: Chapin, 2008:158-166 (diolah)

Manfaat Kebijakan atau Program yang *Strengths-Based*

Chapin mengatakan bahwa dengan diterapkannya pendekatan *strengths-perspective* dalam sebuah kebijakan atau program, kita akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain (Chapin, 2011:18-19):

1. Menangkal pemikiran atau paradigma yang “menyalahkan penyandang masalah” ketika terjadi masalah sosial. Pendekatan ini mencari kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh penyandang masalah, keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Karena berfokus pada solusi, pendekatan ini sebisa mungkin melibatkan penyandang masalah untuk memproyeksikan solusi mereka sendiri dan kemudian mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan mereka.
2. Memberikan kesempatan kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang selama ini aspirasi atau pandangannya kurang didengar atau bahkan diabaikan. Misalnya, orang dengan kulit berwarna, kaum perempuan, kaum gay, kaum lesbian dan penyandang disabilitas. Paradigma ini mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan sosial, penghormatan kepada individu, serta hak akan kesamaan akses.
3. Kita akan semakin bersemangat dan antusias untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang muncul dari kelompok-kelompok tersebut serta bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Penyusun kebijakan juga akan semakin termotivasi untuk mencari solusi atas permasalahan mereka.

Selain mengubah paradigma, implementasi pendekatan *strength-based* juga akan menghasilkan kebijakan atau program yang memiliki karakter berikut (Chapin, 2011:159):

1. Menyingkirkan hambatan-hambatan struktural yang membatasi partisipasi penuh dari penyandang masalah dalam hidup komunitas;
2. Menekankan pada akses, pilihan dan kesempatan bagi penyandang masalah yang dapat menghantar kepada pemberdayaan; dan
3. Dievaluasi dari segi/cara pandang hasil yang diinginkan oleh penyandang masalah.

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang *Strengths-Based*

Kita telah memahami bahwa pendekatan *strengths-perspective* dalam sebuah kebijakan sosial merupakan upaya untuk membuat sebuah kebijakan sosial menjadi lebih efektif dalam menjawab permasalahan dari sarasannya. Pendekatan ini dapat digunakan dalam upaya menganalisis sebuah kebijakan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana kebijakan telah disusun dengan menggali atau memanfaatkan kekuatan, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap sasaran kebijakan.

Program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai salah satu bentuk operasional dari kebijakan sosial juga memerlukan analisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *strengths-perspective* telah termuat di dalamnya. Dengan demikian, apa yang diharapkan dari sebuah program pemberdayaan masyarakat miskin seperti kemandirian, keberlangsungan, keberdayaan, ketahanan, keterlibatan dan sebagainya dapat terwujud.

Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari program pemberdayaan saat ini dimana tidak lagi sekedar membagi-bagikan bantuan (atau bersifat karitatif) tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat memaksimalkan kekuatan mereka untuk

keluar dari jerat kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang *strengths-based* harus berlandaskan pada persoalan dan harapan setiap sarannya. Program pemberdayaan masyarakat miskin juga harus melibatkan setiap sarannya menjadi lebih aktif sebagai pelaku pemberdayaan dan bukan menjadi pihak yang pasif.

KESIMPULAN

Pendekatan *strengths-based* merupakan salah satu kekhasan dalam pekerjaan sosial. Pendekatan ini menempatkan potensi maupun kekuatan yang dimiliki oleh setiap penyandang masalah sebagai sumber dalam proses penyembuhan mereka. Dalam perkembangannya, pendekatan yang awalnya digunakan dalam pekerjaan sosial klinis ini mulai digunakan dalam analisis dan evaluasi kebijakan atau program. Implementasi pendekatan ini dalam pengembangan kebijakan atau program akan menghasilkan nilai tambah bagi kebijakan atau program tersebut terutama dalam menumbuhkan nilai-nilai kemandirian, keberlangsungan, keberdayaan, ketahanan, keterlibatan dan sebagainya kepada setiap sarannya.

Pendekatan *strengths-based* dapat digunakan dalam analisis program pemberdayaan masyarakat miskin sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Analisis program pemberdayaan dengan pendekatan ini akan menggali informasi-informasi tentang sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menjawab atau menyelesaikan persoalan yang menjadi sarannya.

Sebagai sebuah pendekatan baru dalam analisis program pemberdayaan, kita pasti akan menemui tantangan dalam penerapannya. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi antara lain sebagai berikut (Hill, 2008:118-119):

1. Pelibatan berbagai *stakeholder* yang cukup luas dalam perencanaan dan

pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan akan memakan waktu yang cukup lama;

2. Sebuah perubahan yang fundamental mungkin akan menimbulkan penolakan karena mengubah banyak hal yang telah menjadi kebiasaan sejak lama;
3. Sebagai pendekatan yang berfokus pada perubahan yang berkelanjutan, membutuhkan waktu lama dan multi-generasi sehingga dianggap tidak efektif, terlalu mahal atau tidak dapat menjawab permasalahan dengan segera.

Apa yang ditawarkan oleh pendekatan ini adalah untuk memperkuat pendekatan-pendekatan lain. Pendekatan *strengths-based* bukan untuk mengganti pendekatan lain yang telah lama digunakan dalam menyusun maupun menganalisis kebijakan sosial ataupun program pemberdayaan masyarakat miskin. Sebagaimana yang disampaikan Hill (2008:107), mari kita melihat bahwa kerangka *strengths-based* ini bisa menjadi salah satu metode analisis dari sekian banyak metode, dan bukan menggunakannya sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan atau program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chapin, R.K. (2017). *Sosial Policy for Effective Practice: A Strengths-Approach*. New York: Routledge.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Midgley, J., & Livermore, M. (Eds.). (2009). *The Handbook of Social Policy 2nd Edition*. California: Sage Publication, Inc.

- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Spicker, P. (2014). *Social Policy: Theory and Practice*. Bristol: Policy Press.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji dan Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Walsh, M., Stephens, P., & Moore, S. (2000). *Social Policy and Welfare*. Cheltenham: Stanley Thornes.
- Publikasi Ilmiah**
- Chapin, R.K. (1995). Sosial Policy Development: The Strength Perspective. *Social Work*, 40(4), 506-514. doi: [10.1093/sw/40.4.506](https://doi.org/10.1093/sw/40.4.506).
- Guo, W., & Tsui, M. (2010). From Resilience to Resistance: A Reconstruction of the Strengths-Perspective in Sosial Work Practice. *International Sosial Work*, 53(2), 233-245.
- Hill, K. (2008). A Strengths-Based Framework for Sosial Policy: Barriers and Possibilities. *Journal of Policy Practice*, 7(2-3), 106-121. doi: 10.1080/15588740801937920.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 3-13.
- Ishartono., & Raharjo, T.S. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share*, 6(2), 159-167.
- Putera, R.E. (2007). Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Demokrasi*, 6(1), 37-58.
- Rapp, C.A., Pettus, C.A., & Goscha, R.J. (2006). Principles of Strengths-Based Policy. *Journal of Policy Practice*, 5(4), 3-18. doi: 10.1300/J508v05n04_02.
- Tampubolon, J., Sugihen, B.G., Samet, M., Sutanto, D., & Sumardjo. (2006). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama [KUBE]). *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 10-22.